



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

- Yth. 1. Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan
2. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.5.1/002/SE/Dis.Kearsipan.II/2024
TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, guna tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diminta kepada Saudara untuk menggunakan Kode Klasifikasi Arsip dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 6 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH,



Edward Candra

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia



Sosialisasi Penerapan
(Pemendagri 83 Tahun 2022)



KODE KLASIFIKASI ARSIP

*(Kode Klasifikasi Arsip dalam Proses Penciptaan dan
Pemberkasan Arsip)*

Oleh
ILHAM JAYA
Arsiparis Ahli Madya

Palembang, 19 Nopember 2024



Dasar Hukum

(PMDN Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip)

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
5. Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip
7. SE Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4.1 Tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip Di Pemerintah Daerah
8. *Pergub Nomor 32 Tahun 2017 Pedoman Klasifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*
9. SE Sekda No 02 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip





**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 November 2022

Yth. 1. Gubernur,
2. Bupati/Wali kota,
di
Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 100.4.4.1/8557/SJ
TENTANG**

**PENGUNAAN KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah, bersama ini diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyenggarakan pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dengan berpedoman dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Melaksanakan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


MENTERI DALAM NEGERI,
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

- Yth. 1. Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan
2. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

**SURAT EDARAN
NOMOR : 000.5.1/002/SE/Dis.Kearsipan.II/2024
TENTANG**

**KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, guna tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diminta kepada Saudara untuk menggunakan Kode Klasifikasi Arsip dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 6 Nopember 2024

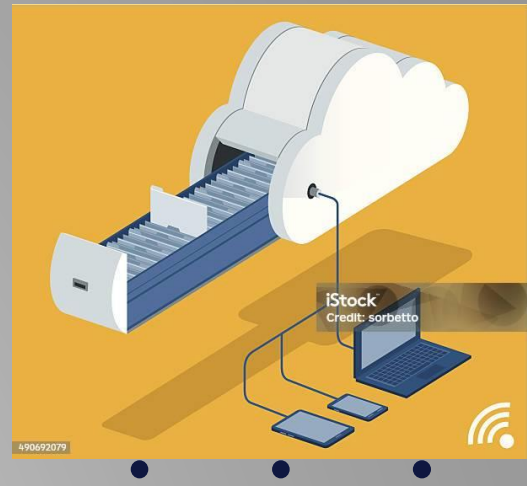
SEKRETARIS DAERAH,



Edward Candra

- Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Selatan
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
 3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Klasifikasi Arsip ???



1. **Klasifikasi Arsip** adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan
2. **Kode Klasifikasi Arsip** adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip



Amanah Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dalam Pasal 40 ayat (4), agar pengelolaan arsip dinamis efektif dan efisien, **Pemerintah Provinsi** harus membuat **Pedoman** tentang **1) Tata Naskah Dinas**, **2) Klasifikasi Arsip**, **3) Jadwal Retensi Arsip**, serta **4) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip**.

(Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis)





Mengapa Berubah ???

1. Pengaturan Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kemendagri dan Pemda, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan (**UU 43/2009**);
2. Untuk mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) (**Perpres 85/2018 --> SPBE**);
3. Kode klasifikasi arsip, perlu menyesuaikan dengan prinsip pengelolaan arsip terutama pada proses penciptaan arsip dan pemberkasan arsip.



Tujuan Kebijakan Kode Klasifikasi Arsip :

1. Sebagai pedoman bagi unit kerja Bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis
2. mewujudkan dan upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan antara Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
3. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan Pemerintah Daerah
4. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip

Prinsip Penyusunan Kode Klasifikasi Arsip

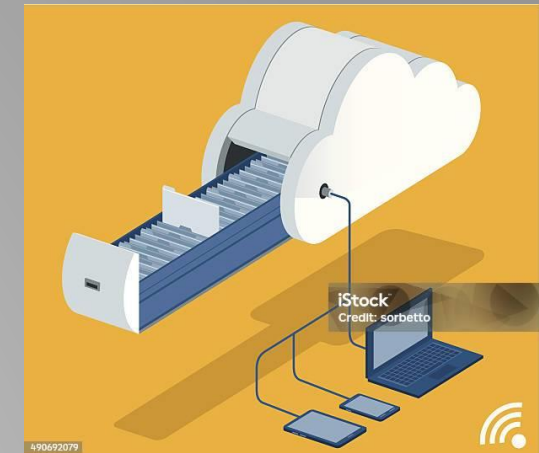


1. Klasifikasi arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip (fungsi fasilitatif dan fungsi substantif)
2. Fungsi fasilitatif merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan perangkat daerah
3. Fungsi substantif merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
4. Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
5. Kode Klasifikasi Arsip berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.

KODE KLASIFIKASI ARSIP

KODE KLASIFIKASI ARSIP (BARU) PMDN No.83 TAHUN 2022	<i>VER SUS</i>	KODE KLASIFIKASI ARSIP (LAMA) PERGUB No.32 TAHUN 2017
000 - UMUM		000 - UMUM
100 - PEMERINTAH		100 - PEMERINTAH
200 - POLITIK		200 - POLITIK
300 - KEAMANAN DAN KETERTIBAN		300 - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
400 - KESEJAHTERAAN SOSIAL		400 - KESEJAHTERAAN SOSIAL
500 - PEREKONOMIAN		500 - PEREKONOMIAN
600 - PEKERJAAN UMUM & KETENAGAAN		600 - PEKERJAAN UMUM & KETENAGAAN
700 - PENGAWASAN		700 - PENGAWASAN
800 - KEPEGAWAIAN		800 - KEPEGAWAIAN
900 - KEUANGAN		900 - KEUANGAN

KLASIFIKASI PRIMER – *TIDAK ADA PERUBAHAN / SAMA*



KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERMENDAGARI
NOMOR 83 TAHUN 2022

~~KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERGUB NO.32 TAHUN 2017~~

KLASIFIKASI :
PRIMER = 10 JENIS
SEKUNDER = ... JENIS
TERSIER = ... JENIS

~~KLASIFIKASI :
PRIMER = 10 JENIS
SEKUNDER = ... JENIS
TERSIER = ... JENIS~~

RINCIAN KODE KLASIFIKASI ARSIP

SILAHKAN DOWNLOAD

**PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2022
(VERSI PDF)**

ATAU

DOWNLOAD FILE

**Buku Pintar Elektronik Kode Klasifikasi
(FILE VERSI EXCEL)**

REKAP KODE KLASIFIKASI

KLASIFIKASI	KODE			
	FUNGSI (PRIMER)	SUB FUNGSI	SEKUNDER (TUGAS / TUSI)	TRANSKASI / KEGIATAN
UMUM	000	9	80	152
PEMERINTAHAN	100	3	24	38
POLITIK	200	2	17	68
KEAMANAN DAN KETERTIBAN	300	2	18	20
KESEJAHTERAAN SOSIAL	400	14	189	532
PEREKONOMIAN	500	18	237	1.065
PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN	600	4	67	213
PENGAWASAN	700	-	1	14
KEPEGAWAIAN	800	2	19	98
KEUANGAN	900	-	1	68
JUMLAH KODE	10	54	653	2.268
	2.985			

KLASIFIKASI

000 - UMUM



Klasifikasi Umum dipakai oleh Semua OPD

000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN	OPD – BIRO UMUM
000.2	PERLENGKAPAN	OPD – BIRO UMUM
000.3	PENGADAAN	OPD - BIRO BARJAS
000.4	PERPUSTAKAAN	OPD – DISPUSTAKA
000.5	KEARSIPAN	OPD - DISARSIP
000.6	PERSANDIAN	OPD – DISKOMINFO
000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	OPD - BAPPEDA
000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	OPD - BIRO ORGANISASI
000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN	OPD - LITBANG

KLASIFIKASI

100 - PEMERINTAHAN

100.1	OTONOMI DAERAH	OPD – BIRO OTDA
100.2	PEMERINTAHAN UMUM	OPD – BIRO PEMERINTAHAN
100.3	HUKUM	OPD – BIRO HUKUM DPRD

KLASIFIKASI

200 - POLITIK

200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	OPD KESBANGPOL, DPRD (CEK LG)
200.2	PEMILU	

KLASIFIKASI

300 – KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	OPD – SATPOL PP
300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN	OPD – SATPOL PP OPD – BPBD

KLASIFIKASI

400 – KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	OPD – BIRO KESRA, DINAS PMD, DINSOS
400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	OPD – DINAS PPA
400.3	PENDIDIKAN	OPD – DIKNAS
400.4	KEOLAHRAGAAN	OPD – DISPORA
400.5	KEPEMUDAAN	OPD – DISPORA
400.6	KEBUDAYAAN	OPD – DISBUDPAR
400.7	KESEHATAN	OPD – DINKES
400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	OPD – BIRO KESRA
400.9	SOSIAL	OPD – DINSOS
400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	OPD – DINAS PMD
400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	OPD – KESRA
400.12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	OPD – DISDUKCAPIL
400.13	KELUARGA BERENCANA	OPD – DIS PPA, DINKES
400.14	HUBUNGAN MASYARAKAT	OPD – BIRO HUMAS

KLASIFIKASI

500 – PEREKONOMIAN

500.1	KETAHANAN PANGAN	OPD – DKPP
500.2	PERDAGANGAN	OPD – DIS PERDAGANGAN
500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	OPD – DIS KOPERASI UKM
500.4	KEHUTANAN	OPD – DIS KEHUTANAN
500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	OPD – DIS LAUT – IKAN
500.6	PERTANIAN	OPD – DIS PERTANIAN
500.7	PETERNAKAN	OPD – DKPP
500.8	PERKEBUNAN	OPD – DISBUN
500.9	PERINDUSITIAN	OPD – DIS PERINDUSTRIAN
500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	OPD – DIS ESDM

KLASIFIKASI

500 – PEREKONOMIAN ... *Lanjutan*

500.11	PERHUBUNGAN	OPD – DISHUB
500.12	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	OPD – KOMINFO
500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	OPD – DISBUDPAR
500.14	STATISTIK	OPD – DIS KOMINFO
500.15	KETENAGAKERJAAN	OPD – DISNAKERTRANS
500.16	PENANAMAN MODAL	OPD – DIS PTSP
500.17	PERTANAHAN	OPD – DLHP
500.18	TRANSMIGRASI	OPD – DISNAKERTRANS

KLASIFIKASI

600 – PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1	PEKERJAAN UMUM	OPD – PU BM
600.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	OPD – PU PERKIM
600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)	OPD – PU PERKIM/ BAPPEDA
600.4	LINGKUNGAN HIDUP	OPD – DLHP

KLASIFIKASI

700	PENGAWASAN	
700.1	PENGAWASAN INTERNAL	OPD - INSPEKTORAT
800	KEPEGAWAIAN	
800.1	SUMBER DAYA MANUSIA	OPD – BKD DAN SEMUA OPD
800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	OPD – BPSDMD DAN SEMUA OPD
900	KEUANGAN	
900.1	KEUANGAN DAERAH	OPD – BPKAD DAN SEMUA OPD

Contoh Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip (Menteri dalam Negeri)

Jakarta, 30 November 2022

Yth. 1. Gubernur.

2. Bupati/Wali kota.

di

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 100.4.4.1/8557/SJ

TENTANG

PENGUNAAN KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Klasifikasi Primer Urusan Pemerintahan	Klasf. Sekunder / (Sub Fungsi) Hukum	Klasf. Tersier (sub Fungsi) Instruksi / Surat Edaran	Sub-sub Fungsi (Kegiatan/ transaksi) Instruksi / Surat Edaran Menteri	Nomor Registrasi Nomor Buku Agenda	Kode Pencipta Arsip (SJ) Sekretaris Jenderal
---	---	---	--	---------------------------------------	---

100	PEMERINTAHAN		
	100.1	PEMERINTAH PUSAT	
	100.2	OTONOMI DAERAH	
	100.3	PEMERINTAH DESA	
	100.4	HUKUM	
		100.4.1	Program Legislasi
		100.4.4	Instruksi/Surat Edaran
		100.4.4.1	Intruksi/Surat Edaran Menteri
		100.4.4.2	Instruksi/ Surat Edaran Setingkat Eselon I dan II, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.
		100.4.5	Surat Perintah
		100.4.5.1	Surat Perintah Menteri
		100.4.5.2	Surat Perintah Eselon I dan II
		100.4.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat Nasional/Regional/Instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.

Contoh Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip

SURAT EDARAN
Nomor : 000 . 5 . 1 / 002 / SE / Dis.Kearsipan.II / 2024
TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Klasifikasi Primer Urusan UMUM	Klasf. Sekunder / (Sub Fungsi) KEARSIPAN	Sub-sub Fungsi (Kegiatan/ transaksi) Kebijakan Bid. Kearsipan	Nomor Registrasi Nomor Buku Agenda	Kode Pencipta Arsip Bidang Pembinaan	Kode Tahun Pembuatan
--	--	---	--	--	--------------------------------

000	UMUM			
	000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN		
	000.2	PERLENGKAPAN		
	000.3	PENGADAAN		
	000.4	PERPUSTAKAAN		
	000.5	KEARSIPAN		
		000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		000.5.2	Pembinaan Kearsipan	
			000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
			000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
			000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
			000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
			000.5.2.5	Data Base Arsiparis

Contoh Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip

Nomor : 700.1.2 / 2161 / INSP-A/2024
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : Himbauan Sosialisasi Media Penanganan Pengaduan
Kepada Yth. :
Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu U
masing-masing
di –
T E M P A T .

Klasifikasi Primer	Klasf. Sekunder / (Sub Fungsi)	Klasf. Tersier Sub Fungsi (Kegiatan/ transaksi)	Nomor Registrasi	Kode Pencipta Arsip	Kode Tahun
Urusan Pengawasan	Pengawasan Internal	Pelaksanaan Pengawasan	Instruksi / Surat Edaran Menteri	Inspektorat Kabupaten	Tahun Pembuatan ND

700	PENGAWASAN		
	700.1	PENGAWASAN INTERNAL	
		700.1.1	Rencana Pengawasan
			700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
			700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
			700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
			700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
			700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
		700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan
			700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
			700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
			700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut

Penggunaan Kode Klasifikasi Dalam Aplikasi Srikandi



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Nomor : 000.5.1/ 449 /SE/Dis.Kearsipan.II/2024
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) ekplr
Hal : Mohon Input Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Kepada Yth.
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
di
Jakarta

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan surat Edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 000.5.1/002/SE/Dis.Kearsipan.II/2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip, guna tertib administrasi penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mohon diinput Kode Klasifikasi Arsip bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 8 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH,



Edward Candra

Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta



H. Ilham Jaya, S.P., M.Si
User

Pejabat Fungsional
Arsiparis Ahli Madya –
PEJABAT FUNGSIONAL
Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan

Beranda

PENCIPTAAN ARSIP



Naskah Masuk



Naskah Keluar



- **Registrasi Naskah Keluar**
 - Daftar Naskah Keluar
 - Log Naskah Keluar
 - Verifikasi Naskah
 - Tandatangan Naskah

MASTER



Pengguna



Detil Isi Naskah

Dikirimkan melalui *

DINAS KEARSIPAN PROV. SUMSEL



Jenis Naskah *

SURAT EDARAN



Sifat Naskah *

BIASA



Klasifikasi *

000.5.1 - Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah...



Nomor Naskah *

Masukkan Nomor Naskah...

AMBIL NOMOR

INFO: Nomor diatas bersifat sementara, guna untuk penyesuaian file digital.

Hal 

Surat Edaran Sekda tentang Pemakaian Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemda sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2022

Isi Ringkas *

Surat Edaran Sekda tentang Pemakaian Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemda sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2022

File packed 🍁

Sekian

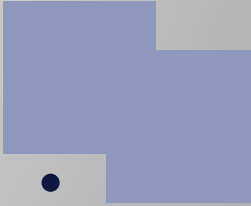
***Pertanyaan Kapan Kode
Klasifikasi Arsip diterapkan ?***

***Kode Klasifikasi Arsip diterapkan
Sejak Surat Edaran Sekda
ditetapkan***



TERIMA KASIH

Untuk perhatiannya



BUKU PINTAR ELEKTRONIK
KODE KLASIFIKASI ARSIP
SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2022

A. KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

000 UMUM

000.1 LAMBANG

- 000.1.1 Lambang provinsi
- 000.1.2 Lambang kabupaten/kota

000.2 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

- 000.2.1 Telekomunikasi
- 000.2.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - 000.2.2.1 Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden
 - 000.2.2.2 Perjalanan Dinas Menteri dan Wakil Menteri
 - 000.2.2.3 Perjalanan Dinas Pejabat Eselon 1
 - 000.2.2.4 Perjalanan Dinas Pegawai
 - 000.2.2.5 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 000.2.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - 000.2.3.1 Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden
 - 000.2.3.2 Perjalanan Dinas Menteri dan Wakil Menteri
 - 000.2.3.3 Perjalanan Dinas Pejabat Eselon 1
 - 000.2.3.4 Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - 000.2.3.5 Perjalanan Dinas Anggota DPRD
 - 000.2.3.6 Perjalanan Dinas Pegawai
- 000.2.4 Penggunaan Fasilitas Kantor Antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya
- 000.2.5 Rapat Pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
- 000.2.6 Penyediaan Konsumsi
- 000.2.7 Pengurusan kendaraan dinas
 - 000.2.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
 - 000.2.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
 - 000.2.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
- 000.2.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
 - 000.2.8.1 Pertamanan/ Landscape
 - 000.2.8.2 Penghijauan
 - 000.2.8.3 Perbaikan Gedung
 - 000.2.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
 - 000.2.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
 - 000.2.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
- 000.2.9 Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon, dan komputer:
 - 000.2.9.1 Perbaikan/pemeliharaan
 - 000.2.9.2 Pemasangan

- 000.2.10 Ketertiban dan keamanan
 - 000.2.10.1 Pengamanan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas
 - 000.2.10.2 Laporan ketertiban dan keamanan
- 000.2.11 Administrasi pengelolaan parkir
- 000.2.12 Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, dan pegawai lainnya

000.3 PERLENGKAPAN

- 000.3.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
 - 000.3.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
 - 000.3.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
- 000.3.2 Pemeliharaan peralatan kantor
 - 000.3.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
 - 000.3.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
- 000.3.3 Distribusi
 - 000.3.3.1 Barang habis pakai
 - 000.3.3.2 Barang milik daerah
- 000.3.4 Penghapusan Barang Milik Daerah Antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan
- 000.3.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

000.4 PENGADAAN

- 000.4.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
- 000.4.2 Pengadaan Langsung Antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak
- 000.4.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang Antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak
- 000.4.4 Swakelola Antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
- 000.4.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan Antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa
- 000.4.6 Monitoring dan Evaluasi Antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

000.5 PERPUSTAKAAN

- 000.5.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- 000.5.2 Deposit Bahan Pustaka
 - 000.5.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - 000.5.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
 - 000.5.2.3 Terbitan Internasional dan Regional
 - 000.5.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - 000.5.2.5 Bibliografi dan Katalog
- 000.5.3 Koleksi Pustaka
 - 000.5.3.1 Pembelian
 - 000.5.3.2 Hibah
 - 000.5.3.3 Hadiah
 - 000.5.3.4 Tukar Menukar
 - 000.5.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR
 - 000.5.3.6 Terbitan Internal
 - 000.5.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus

- 000.5.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
- 000.5.4 Pengolahan Bahan Pustaka
- 000.5.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi

- 000.5.6 Layanan Perpustakaan
 - 000.5.6.1 Keanggotaan
 - 000.5.6.2 Peminjaman
 - 000.5.6.3 Pengembangan gemar baca
- 000.5.7 Kerjasama Perpustakaan
 - 000.5.7.1 MoU
 - 000.5.7.2 Perjanjian kerjasama
 - 000.5.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
- 000.5.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
 - 000.5.8.1 Pengembangan situs web
 - 000.5.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
 - 000.5.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan
 - 000.5.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital
- 000.5.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
- 000.5.10 Konservasi
 - 000.5.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
 - 000.5.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
 - 000.5.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan
- 000.5.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
- 000.5.12 Transformasi Digital
- 000.5.13 Kurasi Digital
- 000.5.14 Pengembangan Perpustakaan
 - 000.5.14.1 Perpustakaan Umum
 - 000.5.14.2 Perpustakaan Khusus
 - 000.5.14.3 Perpustakaan Sekolah
 - 000.5.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi

000.6 KEARSIPAN

- 000.6.1 Kebijakan
 - Kebijakan di bidang kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- 000.6.2 Pembinaan Kearsipan
 - 000.6.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis Antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
 - 000.6.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
 - 000.6.2.3 Penilaian Arsiparis
 - 000.6.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan Antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
 - 000.6.2.5 Data Base Arsiparis
 - 000.6.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan
 - 000.6.2.7 Supervisi dan Evaluasi Antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
 - 000.6.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
 - 000.6.2.9 Fasilitasi Kearsipan Antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan

- 000.6.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan Antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
- 000.6.2.11 Jadwal Retensi Arsip Antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI

- 000.6.3 Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 000.6.3.1 Penciptaan Antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi
 - 000.6.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif Antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas
 - 000.6.3.3 Penataan Arsip Inaktif Antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik
 - 000.6.3.4 Penggunaan Antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip
 - 000.6.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis Antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis
- 000.6.4 Program Arsip Vital Antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital
- 000.6.5 Pengelolaan Arsip Terjaga Antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga.
- 000.6.6 Penyusutan Arsip
 - 000.6.6.1 Pemindahan Arsip Antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan
 - 000.6.6.2 Pemusnahan Arsip Antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan.
 - 000.6.6.3 Penyerahan Arsip Statis Antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan
- 000.6.7 Alih Media Arsip Antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan
- 000.6.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 000.6.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
 - 000.6.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
- 000.6.9 Pengelolaan Arsip Statis
 - 000.6.9.1 Akuisisi Antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan
 - 000.6.9.2 Penghargaan dan Imbalan
 - 000.6.9.3 Sejarah Lisan Antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip

- 000.6.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
- 000.6.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik Antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide
- 000.6.9.6 Preservasi Preventif Antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
- 000.6.9.7 Preservasi Kuratif
- 000.6.9.8 Autentikasi Arsip Statis Antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis
- 000.6.9.9 Akses Arsip Statis Antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber
- 000.6.10 Jasa Kearsipan Antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip
- 000.6.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN
- 000.6.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
- 000.6.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
- 000.6.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
- 000.6.15 Pengawasan Kearsipan
 - 000.6.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
 - 000.6.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
 - 000.6.15.3 Sanksi

000.7 PERSANDIAN

- 000.7.1 Kebijakan di bidang Persandian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- 000.7.2 Pengamanan persandian
 - 000.7.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi
 - 000.7.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi
 - 000.7.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan
- 000.7.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
 - 000.7.3.1 Perencanaan Pengkajian
 - 000.7.3.2 Administrasi Pengkajian
 - 000.7.3.3 Pelaksanaan
 - 000.7.3.4 Pelaporan
- 000.7.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
 - 000.7.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 000.7.4.2 Jaring Komunikasi
- 000.7.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
 - 000.7.5.1 Perencanaan dan Administrasi
 - 000.7.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
 - 000.7.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
 - 000.7.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
 - 000.7.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
 - 000.7.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
 - 000.7.5.7 Pelaporan

000.8 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- 000.8.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
 - 000.8.1.1 Musrenbang Provinsi
 - 000.8.1.2 Musrenbang Nasional
 - 000.8.1.3 Musrenbang Kab/Kota
- 000.8.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 000.8.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 - 000.8.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 - 000.8.2.3 Rencana Anggaran Daerah
 - 000.8.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
 - 000.8.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 000.8.2.6 Program kerja tahunan
 - 000.8.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
 - 000.8.2.8 Laporan Berkala
 - 000.8.2.9 Laporan Insidental
 - 000.8.2.10 Evaluasi Program
- 000.8.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
- 000.8.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
- 000.8.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
- 000.8.6 Aksi Strategis Daerah
 - 000.8.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
 - 000.8.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
 - 000.8.6.3 Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
 - 000.8.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
 - 000.8.6.5 Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
- 000.8.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
 - 000.8.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
 - 000.8.7.2 Pendanaan Daerah
 - 000.8.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
 - 000.8.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
 - 000.8.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

000.9 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- 000.9.1 Struktur Organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
 - 000.9.1.1 Pembentukan
 - 000.9.1.2 Pengubahan
 - 000.9.1.3 Pembubaran
- 000.9.2 Uraian Jabatan
 - 000.9.2.1 Analisa Jabatan
 - 000.9.2.2 Analisa Beban Kerja
- 000.9.3 Ketatalaksanaan
 - 000.9.3.1 Proses Bisnis
 - 000.9.3.2 Standar Pelayanan
 - 000.9.3.3 Standar Operasional Prosedur
 - 000.9.3.4 Pelayanan Publik
- 000.9.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional

- 000.9.5 Evaluasi Kelembagaan
- 000.9.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
 - 000.9.6.1 Budaya Kerja
 - 000.9.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
 - 000.9.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

000.10 STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

- 000.10.1 Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri
- 000.10.2 Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri
- 000.10.3 Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri
- 000.10.4 Pemantaran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri
- 000.10.5 Pelaksanaan administrasi strategi kebijakan dalam negeri
- 000.10.6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

100 PEMERINTAHAN

100.1 PEMERINTAH PUSAT

- 100.1.1 Kebijakan di bidang Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
 - 100.1.1.1 Susunan Kabinet meliputi: Pengangkatan Menteri, penunjukan Menteri ad interim dan Amanat Menteri

100.2 OTONOMI DAERAH

- 100.2.1 Perumusan Kebijakan
 - 100.2.1.1 Perumusan kebijakan di bidang penataan daerah
 - 100.2.1.2 Otonomi khusus dan daerah istimewa
 - 100.2.1.3 Administrasi Kepala Daerah
 - 100.2.1.4 Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 100.2.1.5 Pembinaan umum kelembagaan daerah
 - 100.2.1.6 Kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah
 - 100.2.1.7 Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 100.2.2 Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi
 - 100.2.2.1 Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penataan daerah
 - 100.2.2.2 Otonomi khusus dan daerah istimewa
 - 100.2.2.3 Administrasi Kepala Daerah
 - 100.2.2.4 Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 100.2.2.5 Pembinaan umum kelembagaan daerah
 - 100.2.2.6 Kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah
 - 100.2.2.7 Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 100.2.3 Pelaksanaan Fasilitasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
- 100.2.4 Pelaksanaan Pembinaan Umum
 - 100.2.4.1 Pelaksanaan Pembinaan Umum di bidang penataan daerah
 - 100.2.4.2 Otonomi khusus dan daerah istimewa
 - 100.2.4.3 Administrasi Kepala Daerah
 - 100.2.4.4 Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 100.2.4.5 Pembinaan umum kelembagaan daerah
 - 100.2.4.6 Kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah
 - 100.2.4.7 Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 100.2.5 Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
 - 100.2.5.1 Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Penataan Daerah
 - 100.2.5.2 Otonomi khusus dan daerah istimewa
 - 100.2.5.3 Administrasi Kepala Daerah
 - 100.2.5.4 Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 100.2.5.5 Pembinaan umum kelembagaan daerah
 - 100.2.5.6 Kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah
 - 100.2.5.7 Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 100.2.6 Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
 - 100.2.6.1 Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Penataan
 - 100.2.6.2 Otonomi khusus dan daerah istimewa
 - 100.2.6.3 Administrasi Kepala Daerah
 - 100.2.6.4 Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 100.2.6.5 Pembinaan umum kelembagaan daerah
- 100.2.6.6 Kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah
- 100.2.6.7 Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 100.2.7 Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal
- 100.2.8 Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Menteri

100.3 PEMERINTAH DESA

- 100.3.1 Perumusan Kebijakan
 - 100.3.1.1 Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Penataan Desa
 - 100.3.1.2 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
 - 100.3.1.3 Pengelolaan keuangan dan aset desa
 - 100.3.1.4 Produk hukum desa
 - 100.3.1.5 Pemilihan kepala desa, perangkat desa
 - 100.3.1.6 Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan
 - 100.3.1.7 Kelembagaan desa
 - 100.3.1.8 Kerja sama pemerintahan
 - 100.3.1.9 Evaluasi perkembangan desa
- 100.3.2 Pelaksanaan Kebijakan
 - 100.3.2.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Penataan Desa
 - 100.3.2.2 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
 - 100.3.2.3 Pengelolaan keuangan dan aset desa
 - 100.3.2.4 Produk hukum desa
 - 100.3.2.5 Pemilihan kepala desa, perangkat desa
 - 100.3.2.6 Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan
 - 100.3.2.7 Kelembagaan desa
 - 100.3.2.8 Kerja sama pemerintahan
 - 100.3.2.9 Evaluasi perkembangan desa
- 100.3.3 Pelaksanaan Pembinaan Umum dan Koordinasi
 - 100.3.3.1 Pelaksanaan Pembinaan Umum dan koordinasi di Bidang Fasilitasi Penataan Desa
 - 100.3.3.2 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
 - 100.3.3.3 Pengelolaan keuangan dan aset desa
 - 100.3.3.4 Produk hukum desa
 - 100.3.3.5 Pemilihan kepala desa, perangkat desa
 - 100.3.3.6 Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan
 - 100.3.3.7 Kelembagaan desa
 - 100.3.3.8 Kerja sama pemerintahan
 - 100.3.3.9 Evaluasi perkembangan desa
- 100.3.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
 - 100.3.4.1 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa
 - 100.3.4.2 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
 - 100.3.4.3 Pengelolaan keuangan dan aset desa
 - 100.3.4.4 Kelembagaan desa
 - 100.3.4.5 Kerja sama desa
- 100.3.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

- 100.3.5.1 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa
- 100.3.5.2 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- 100.3.5.3 Pengelolaan keuangan dan aset desa
- 100.3.5.4 Produk hukum desa
- 100.3.5.5 Pemilihan kepala desa, perangkat desa
- 100.3.5.6 Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan
- 100.3.5.7 Kelembagaan desa
- 100.3.5.8 Kerja sama pemerintahan
- 100.3.5.9 Evaluasi perkembangan desa

- 100.3.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
 - 100.3.6.1 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Fasilitasi Penataan Desa
 - 100.3.6.2 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
 - 100.3.6.3 Pengelolaan keuangan dan aset desa
 - 100.3.6.4 Produk hukum desa
 - 100.3.6.5 Pemilihan kepala desa, perangkat desa
 - 100.3.6.6 Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan
 - 100.3.6.7 Kelembagaan desa
 - 100.3.6.8 Kerja sama pemerintahan
 - 100.3.6.9 Evaluasi perkembangan desa
- 100.3.7 Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
- 100.3.8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

100.4 HUKUM

- 100.4.1 Program Legislasi
 - 100.4.1.1 Bahan/materi program legislasi nasional dari instansi
 - 100.4.1.2 Program legislasi Kementerian Dalam Negeri
- 100.4.2 Rancangan Peraturan Perundang-undangan
 - 100.4.2.1 Rancangan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.
 - 100.4.2.2 Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.
 - 100.4.2.3 Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.
 - 100.4.2.4 Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.
- 100.4.3 Peraturan/Keputusan Menteri, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.
- 100.4.4 Instruksi/Surat Edaran
 - 100.4.4.1 Intruksi/Surat Edaran Menteri
 - 100.4.4.2 Instruksi/ Surat Edaran Setingkat Eselon I dan II, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.
- 100.4.5 Surat Perintah
 - 100.4.5.1 Surat Perintah Menteri
 - 100.4.5.2 Surat Perintah Eselon I dan II
- 100.4.6 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat Nasional/Regional/Instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.
- 100.4.7 Nota kesepahaman / memorandum of Understanding (Mou)/ Kontrak/Perjanjian Kerjasama:

- 100.4.7.1 Dalam Negeri
 - 100.4.7.2 Luar Negeri
- 100.4.8 Dokumen Hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan-peraturan yang dijadikan referensi.
- 100.4.9 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
 - 100.4.9.1 Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum

- 100.4.9.2 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan Hukum
- 100.4.10 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
- 100.4.11 Kasus/ Sengketa Hukum
 - 100.4.11.1 Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran antara lain:
 - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis
 - Berkas pembelaan dan bantuan hukum
 - Telaah hukum dan opini hukum
 - 100.4.11.2 Berkas tentang kasus/sengketa perdata antara lain:
 - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis
 - Berkas pembelaan dan bantuan hukum
 - Telaah hukum dan opini hukum
 - 100.4.11.3 Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara antara lain:
 - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis
 - Berkas pembelaan dan bantuan hukum
 - Telaah hukum dan opini hukum
 - 100.4.11.4 Berkas tentang kasus/sengketa perburuhan antara lain:
 - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis
 - Telaah hukum dan opini hukum
 - 100.4.11.5 Berkas tentang kasus/sengketa Arbitrase antara lain:
 - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis
 - Berkas pembelaan dan bantuan hukum
 - Telaah hukum dan opini hukum
- 100.4.12 Perijinan
 - Berkas perijinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin.
- 100.4.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 100.4.13.1 Hak Cipta
 - 100.4.13.2 Hak Paten Biasa
 - 100.4.13.3 Hak Paten Sederahana
 - 100.4.13.4 Hak Desain Industri
 - 100.4.13.5 Hak Rahasia Dagang
 - 100.4.13.6 Hak Merk
 - 100.4.13.7 DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
- 100.4.14 Permohonan HAKI yang ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk, Rahasia Dagang, Desain tata letak Sirkuit Terpadu)

200 POLITIK

200.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN

- 200.1.1 Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi
- 200.1.2 Fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

200.2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN

- 200.2.1 Pelaksanaan Kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan Politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi

- 200.2.2 Penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila
- 200.2.3 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- 200.2.4 Pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

200.3 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG FASILITASI ORGANISASI MASYRAKAT DAN FASIITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

200.4 PELAKSANAAN PEMBINAAN UMUM

- 200.4.1 Pelaksanaan Pembinaan Umum di Bidang Penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi
- 200.4.2 Fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila
- 200.4.3 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
- 200.4.4 Pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
- 200.4.5 Fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

200.5 PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI

- 200.5.1 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri
- 200.5.2 Fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila
- 200.5.3 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
- 200.5.4 Pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
- 200.5.5 Fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

200.6 PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- 200.6.1 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi
- 200.6.2 Fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila
- 200.6.3 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
- 200.6.4 Pembinaan kewaspadaan nasional
- 200.6.5 Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
- 200.6.6 Fasilitasi penanganan konflik sosial

200.7 PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL

200.8 PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN

- 300.1.1 Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah
- 300.1.2 Penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara
- 300.1.3 Kerja sama daerah
- 300.1.4 Fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- 300.1.5 Fasilitasi kecamatan
- 300.1.6 Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan
- 300.1.7 Manajemen bencana dan kebakaran
- 300.1.8 Pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

300.2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN

- 300.2.1 Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah
- 300.2.2 Penamaan rupa bumi dan data wilayah
- 300.2.3 penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara
- 300.2.4 Kerja sama daerah
- 300.2.5 Fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- 300.2.6 Fasilitasi kecamatan
- 300.2.7 Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan
- 300.2.8 Manajemen bencana dan kebakaran
- 300.2.9 Pelaksanaan tugas tampung tantra

300.3 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KOORDINASI PENETAPAN KAWASAN KHUSUS DAN PERKOTAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

300.4 PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA DI BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

300.5 PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI

- 300.5.1 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah
- 300.5.2 Penetapan perbatasan antar daerah
- 300.5.3 Penetapan kawasan perkotaan
- 300.5.4 Kerja sama daerah
- 300.5.5 Fasilitasi perselisihan pemerintahan
- 300.5.6 Ketentraman dan ketertiban umum
- 300.5.7 Perlindungan masyarakat
- 300.5.8 Fasilitasi kecamatan

300.6 PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- 300.6.1 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah

- 300.6.2 Penamaan rupa bumi dan data wilayah
- 300.6.3 Penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara
- 300.6.4 Kerja sama daerah
- 300.6.5 Fasilitasi perselisihan pemerintahan
- 300.6.6 Ketentraman, ketertiban umum
- 300.6.7 Perlindungan masyarakat
- 300.6.8 Fasilitasi kecamatan
- 300.6.9 Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan
- 300.6.10 Manajemen bencana dan kebakaran
- 300.6.11 Pelaksanaan tugas tampung tantra

300.7 PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL

300.8 PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PENDIDIKAN

- 400.1.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 400.1.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 400.1.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 400.1.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 400.1.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 400.1.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 400.1.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pendidikan

400.2 OLAHRAGA

- 400.2.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 400.2.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 400.2.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 400.2.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 400.2.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 400.2.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 400.2.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Olahraga

400.3 KEPEMUDAAN

- 400.3.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 400.3.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 400.3.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 400.3.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 400.3.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 400.3.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 400.3.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang kepemudaan

400.4 SOSIAL DAN BUDAYA

- 400.4.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 400.4.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 400.4.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 400.4.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 400.4.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 400.4.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 400.4.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Sosial dan Budaya

400.5 KESEHATAN

- 400.5.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 400.5.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 400.5.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 400.5.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 400.5.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 400.5.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 400.5.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Kesehatan

400.6 AGAMA DAN KEPERCAYAAN

- 400.6.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah
- 400.6.2 Fasilitasi meliputi:
 - Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
 - Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
 - Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
 - Kasus Keagamaan
 - Kasus Aliran Keagamaan
- 400.6.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME meliputi:
 - Kelembagaan dan kepercayaan
 - Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
 - Komunitas Kepercayaan
 - Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
 - Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

400.7 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 400.7.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 400.7.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 400.7.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 400.7.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 400.7.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 400.7.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 400.7.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

400.8 KEPENDUDUKAN

- 400.8.1 Perencanaan umum dan program kependudukan Pendaftaran penduduk meliputi :
 - 400.8.1.1 Formulir biodata penduduk
 - 400.8.1.2 Formulir permohonan, perpanjangan pembahasan KTP, KK dan Mutasi penduduk pengawasan KTP, dan Mutasi penduduk
 - 400.8.1.3 Formulir permohonan, perlindungan dokumen KTP, KK dan akta-akta adopsi, perubahan penggantian nama, pemalsuan dokumen, pendidikan, sensus kependudukan, warga negara asing
 - 400.8.1.4 Pengangkatan pejabat luar biasa catatan sipil dan pembantunya

- 400.8.1.5 Pendaftaran dan perpindahan penduduk WNA
- 400.8.1.6 Pendaftaran dan perpindahan WNI
- 400.8.1.7 Pendaftaran dan perpindahan penduduk pengungsi dan rentan, akibat bencana alam, kerusuhan sosial, daerah terbelakang
- 400.8.1.8 Proses pengangkatan pejabat luar biasa, pencatatan sipil dan pembantunya
- 400.8.1.9 Data evaluasi jumlah pengangguran, cara penanggulangan pengangguran

- 400.8.2 Pencatatan Sipil meliputi :
 - 400.8.2.1 Formulir permohonan akta kelahiran perkawinan, perceraian, ganti perubahan nama kenal lahir/matii, adopi, perubahan pengganti nama, pemalsuan dokumen pendidikan sensus kependudukan
 - 400.8.2.2 Akta kelahiran dan kematian
 - 400.8.2.3 Kasus-kasus nikah cerai, rujuk meliputi: Penyelesaian dan laporanya
 - 400.8.2.4 Kewarganegaraan WNA meliputi: Permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya
 - 400.8.2.5 Data dan informasi mengenai pencatatan pewarganegaraan non perkawinan dan kelahiran
 - 400.8.2.6 Catatan kelahiran dan kematian
 - 400.8.2.7 Catatan perkawinan dan perceraian agama Islam
 - 400.8.2.8 Catatan perkawinan dan perceraian non Islam
 - 400.8.2.9 Catatan perkawinan dan perceraian advokasi perkawinan dan perceraian
 - 400.8.2.10 Identifikasi dan inventarisasi sistem, prosedur dan standar pelayanan pencataan pengangkatan pengakuan, pengesahan anak, perubahan dan pembatalan akta advokasi
 - 400.8.2.11 Catatan tentang pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan dan pembatalan akta
 - 400.8.2.12 Data dan informasi tentang pencatatan kewarganegaraan akibat perkawinan, kelahiran, dan non perkawinan kelahiran.
 - 400.8.2.13 Kebijakan dan pedoman teknis pencatatan kewarganegaraan
 - 400.8.2.14 Bahan-bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi pencatatan sipil
 - 400.8.2.15 Sistem dokumentasi pencatatan sipil
- 400.8.3 Informasi Kependudukan
 - 400.8.3.1 Pengembangan perangkat lunak, keras, dan jaringan komunikasi data
 - 400.8.3.2 Fasilitas teknis pengembangan perangkat lunak, keras, jaringan komunikasi data
 - 400.8.3.3 Manual teknis pengolahan data pendaftaran penduduk dan catatan sipil, daerah maju, berkembang
 - 400.8.3.4 Kebijakan dan pedoman teknis pengolahan data pendaftaran penduduk, biodata, NIK, KTP, dan KK
 - 400.8.3.5 Manual teknis pengolahan data kejadian vital meliputi kelahiran, kematian, kedatangan dan perpindahan penduduk
 - 400.8.3.6 Manual teknis pengolahan data penduduk dan non registrasi
 - 400.8.3.7 Manual teknis pengolahan sistem pelayanan media elektronik cetak dan outlet
 - 400.8.3.8 Fasilitas pelayanan media elektronik, cetak dan outlet
 - 400.8.3.9 Bahan-bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi informasi kependudukan
 - 400.8.3.10 Sistem dokumentasi informasi kependudukan
- 400.8.4 Perkembangan Penduduk
 - 400.8.4.1 Struktur dan komposisi penduduk
 - 400.8.4.2 Fertilitas, kesehatan, dan reproduksi
 - 400.8.4.3 Morbilitas dan mortalitas penduduk dan fasilitas
 - 400.8.4.4 Data kuantitas penduduk

- 400.8.4.5 Pengembangan Kualitas anak, remaja, penduduk usia produktif dan lanjut usia
- 400.8.4.6 Data informasi pengembangan kualitas penduduk
- 400.8.4.7 Penataan persebaran penduduk antar wil sementara dan migran non permanen
- 400.8.4.8 Data dan Informasi persebaran penduduk
- 400.8.4.9 Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk
- 400.8.4.10 Penataan penduduk sementara dan non migran permanen
- 400.8.4.11 Manual teknis perlindungan penduduk
- 400.8.4.12 Telaahan dan kajian pengelolaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sosial budaya
- 400.8.4.13 Manual teknis pelayanan kelembagaan pemberdayaan masyarakat ekonomi dan sosial budaya
- 400.8.4.14 Telaahan dan Pengkajian pengembangan wawasan kependudukan melalui pendidikan jalur sekolah, luar sekolah dan masyarakat
- 400.8.5 Proyeksi dan penyesuaian kebijakan kependudukan
 - 400.8.5.1 Telaahan & pengkajian pengembangan, dokumentasi, pemanfaatan kependudukan
 - 400.8.5.2 Kebijakan dan pedoman teknis kependudukan
 - 400.8.5.3 Telaahan dan pengkajian implikasi, analisis, struktur dan komposisi, pemanfaatan proyeksi penduduk
 - 400.8.5.4 Data, informasi, dan dokumentasi proyeksi penduduk
 - 400.8.5.5 Klasifikasi dan pedoman teknis proyeksi penduduk
 - 400.8.5.6 Telaahan dan pengkajian dampak kependudukan advokasi dan standarisasi
 - 400.8.5.7 Kebijakan dan pedoman teknis analisis dampak kependudukan
 - 400.8.5.8 Telaahan dan pengkajian penyerasian lembaga usaha swasta, masyarakat dan mitra internasional
 - 400.8.5.9 Penyelesaian lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/Kota
 - 400.8.5.10 Kebijakan dan Pedoman teknis penyelesaian kelembagaan
- 400.8.6 Kewarganegaraan Asing
 - 400.8.6.1 Keimigrasian meliputi : pembinaan, penyuluhan, pengendalian, pengembangan
 - 400.8.6.2 Data imigrasi yang masuk
 - 400.8.6.3 Kasus paspor / visa palsu
 - 400.8.6.4 Bukti pelaporan warga negara asing pelaporan /keterangan tamu warga negara asing
 - 400.8.6.5 Pengusiran warga negara asing / bangsa asing
 - 400.8.6.6 Perpindahan bangsa asing
 - 400.8.6.7 Kewarganegaraan meliputi : permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya
 - 400.8.6.8 Laporan jumlah WNI keturunan asing
- 400.8.7 Urbanisasi
 - 400.8.7.1 Ketentuan dan tata cara penanggulangan urbanisasi
 - 400.8.7.2 Penanggulangan urbanisasi dan pelaksanaan penanggulangan

400.9 KELUARGA BERENCANA

- 400.9.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 400.9.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum,
- 400.9.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 400.9.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 400.9.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 400.9.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

400.10 HUBUNGAN MASYARAKAT

- 400.10.1 Keprotokolan
 - 400.10.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
 - 400.10.1.2 Buku tamu Keprotokolan
 - 400.10.1.3 Agenda kegiatan pimpinan
 - 400.10.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
- 400.10.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat
- 400.10.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media
- 400.10.4 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
 - 400.10.4.1 Kliping koran
 - 400.10.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat
 - 400.10.4.3 Pengumuman /pemberitaan
- 400.10.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
 - 400.10.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah
 - 400.10.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
 - 400.10.5.3 Hubungan dengan perusahaan
 - 400.10.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)
 - 400.10.5.5 Forum Kehumasan
 - 400.10.5.6 Hubungan dengan Media Massa
- 400.10.6 Dengar pendapat/hearing DPRD
- 400.10.7 Bahan/materi pidato Menteri Dalam Negeri
- 400.10.8 Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
- 400.10.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
- 400.10.10 Pameran /sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan
- 400.10.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
- 400.10.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 PERTANIAN DAN PANGAN

- 500.1.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 500.1.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 500.1.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 500.1.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 500.1.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 500.1.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 500.1.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pangan

500.2 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- 500.2.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 500.2.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum,

- 500.2.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 500.2.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 500.2.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 500.2.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan

500.3 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL

- 500.3.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 500.3.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 500.3.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah , dan penanaman modal
- 500.3.4 Penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 500.3.5 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 500.3.6 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 500.3.7 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 500.3.8 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal

500.4 KEHUTANAN

- 500.4.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 500.4.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 500.4.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 500.4.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 500.4.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 500.4.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 500.4.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Kehutanan

500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 500.5.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 500.5.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 500.5.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 500.5.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 500.5.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 500.5.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 500.5.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan

500.6 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- 500.6.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 500.6.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 500.6.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 500.6.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 500.6.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 500.6.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 500.6.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

500.7 PERHUBUNGAN

- 500.7.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 500.7.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum

- 500.7.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 500.7.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 500.7.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 500.7.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 500.7.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Perhubungan

500.8 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 500.8.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 500.8.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 500.8.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 500.8.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 500.8.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 500.8.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 500.8.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika

500.9 PARIWISATA

- 500.9.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 500.9.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 500.9.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 500.9.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 500.9.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 500.9.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 500.9.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pariwisata

500.10 STATISTIK DAN PERSANDIAN

- 500.10.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 500.10.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 500.10.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 500.10.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 500.10.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 500.10.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 500.10.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Statistik dan Persandian

500.11 KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

- 500.11.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 500.11.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 500.11.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 500.11.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 500.11.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 500.11.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 500.11.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

500.12 PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

- 500.12.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 500.12.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 500.12.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 500.12.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 500.12.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 500.12.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 500.12.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang

600 PEMBANGUNAN DAERAH

600.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN

- 600.1.1 Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
- 600.1.2 perencanaan pembangunan daerah
- 600.1.3 Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah
- 600.1.4 Fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

600.2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN

- 600.2.1 Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
- 600.2.2 perencanaan pembangunan daerah
- 600.2.3 Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

600.3 PELAKSANAAN PEMBINAAN UMUM DAN KOORDINASI

- 600.3.1 Pelaksanaan Pembinaan umum dan koordinasi Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- 600.3.2 Perencanaan pembangunan daerah,
- 600.3.3 Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah
- 600.3.4 Fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

600.4 PELAKSANAAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA SERTA STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

600.5 PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- 600.5.1 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
- 600.5.2 Perencanaan pembangunan daerah
- 600.5.3 Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah
- 600.5.4 Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat

600.6 PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI

- 600.6.1 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
- 600.6.2 Perencanaan pembangunan daerah,
- 600.6.3 Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah,
- 600.6.4 Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;

600.7 PELAKSANAAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL

600.8 PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI

600.9 PEKERJAAN UMUM

- 600.9.1 Penyiapan perumusan kebijakan

- 600.9.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 600.9.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 600.9.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 600.9.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 600.9.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 600.9.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Pekerjaan Umum

600.10 PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

- 600.10.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 600.10.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 600.10.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 600.10.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 600.10.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 600.10.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 600.10.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

600.11 LINGKUNGAN HIDUP

- 600.11.1 Penyiapan perumusan kebijakan
- 600.11.2 Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum
- 600.11.3 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan
- 600.11.4 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan
- 600.11.5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 600.11.6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi
- 600.11.7 Harmonisasi pembangunan daerah di bidang Lingkungan Hidup

700 PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

- 700.1.1 Rencana Pengawasan
 - 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
 - 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
 - 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
- 700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
 - 700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
 - 700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
 - 700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
 - 700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
 - 700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
 - 700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
 - 700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
 - 700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
 - 700.1.2.9 *Good Corporate Governance* (GCG)

800 KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

- 800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
 - 800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain : Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan
 - 800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain : Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
 - 800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
 - 800.1.1.4 Standarisasi Jabatan Antara lain : Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
- 800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai
 - 800.1.2.1 Formasi ASN Antara lain : Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
 - 800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain : Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
 - 800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN
 - 800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
 - 800.1.2.5 Pengangkatan ASN
 - 800.1.2.6 *Open Bidding* (Seleksi Terbuka Jabatan)
 - 800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
 - 800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
- 800.1.3 Mutasi Pegawai
 - 800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
 - 800.1.3.2 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
 - 800.1.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
 - 800.1.3.4 Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
 - 800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja
 - 800.1.3.6 Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
- 800.1.4 Pengembangan Karir
 - 800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
 - 800.1.4.2 Penyesuaian ijazah
 - 800.1.4.3 Penyusunan Sistem Karier
 - 800.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
 - 800.1.4.5 Angka Kredit Antara lain : Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
- 800.1.5 Kinerja Aparatur Sipil Negara
 - 800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
 - 800.1.5.2 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
 - 800.1.5.3 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
- 800.1.6 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN

- 800.1.6.1 Kode Etik Pegawai
- 800.1.6.2 Disiplin
- 800.1.6.3 Pemberhentian Dengan Hormat
- 800.1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
- 800.1.6.5 Pemberhentian Sementara
- 800.1.6.6 Pensiun ASN Antara lain : Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
- 800.1.7 Bantuan Hukum
- 800.1.8 Status dan Kedudukan Pegawai
 - 800.1.8.1 Status Kepegawaian
 - 800.1.8.2 Kedudukan Kepegawaian
 - 800.1.8.3 Keberatan Pegawai
 - 800.1.8.4 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
- 800.1.9 Sistem Informasi Kepegawaian
 - 800.1.9.1 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
 - 800.1.9.2 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 800.1.9.3 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
 - 800.1.9.4 Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
- 800.1.10 Pengawasan dan pengendalian
 - 800.1.10.1 Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
 - 800.1.10.2 Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
 - 800.1.10.3 Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
 - 800.1.10.4 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
 - 800.1.10.5 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
 - 800.1.10.6 Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorar
- 800.1.11 Administrasi Pegawai
 - 800.1.11.1 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
 - 800.1.11.2 Cuti Sakit
 - 800.1.11.3 Cuti Bersalin
 - 800.1.11.4 Cuti Tahunan
 - 800.1.11.5 Cuti Alasan Penting
 - 800.1.11.6 Cuti Besar
 - 800.1.11.7 Cuti Di luar Tanggungan Negara
 - 800.1.11.8 Karpeg/KPE/Karis/Karsu
 - 800.1.11.9 Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
 - 800.1.11.10 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
 - 800.1.11.11 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
 - 800.1.11.12 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
 - 800.1.11.13 Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
- 800.1.12 Kesejahteraan Pegawai
 - 800.1.12.1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
 - 800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS
 - 800.1.12.3 Tabungan Perumahan
 - 800.1.12.4 Bantuan Sosial
 - 800.1.12.5 Pakaian Dinas

- 800.1.12.6 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
- 800.1.12.7 Pemberian Tali Kasih
- 800.1.12.8 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
- 800.1.12.9 Olahraga dan Rekreasi
- 800.1.12.10 Rekam Medis
- 800.1.13 Administrasi Perseorangan
 - 800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - 800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
 - 800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
 - 800.1.13.4 Sekretaris Daerah
 - 800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
- 800.1.14 Penilaian Kompetensi
 - 800.1.14.1 Penilaian Kompetensi
 - 800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi

800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri
- 800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
 - 800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
 - 800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
 - 800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
 - 800.2.2.4 Modul-modul diklat
 - 800.2.2.5 Panduan fasilitator
 - 800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
 - 800.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
 - 800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
 - 800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
- 800.2.3 Widyaiswara
 - 800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
 - 800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
 - 800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
 - 800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara
 - 800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
 - 800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
- 800.2.4 Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
 - 800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
 - 800.2.4.5 Sistem informasi diklat
 - 800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat
 - 800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
- 800.2.5 Alumni Diklat

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

- 900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
 - 900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
 - 900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
 - 900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
 - 900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
- 900.1.2 Penyusunan Anggaran
 - 900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
 - 900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
 - 900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
 - 900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

- 900.1.3 Pelaksanaan Anggaran
 - 900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
 - 900.1.3.2 Pendapatan
 - 900.1.3.3 Belanja
 - 900.1.3.4 Pembiayaan Daerah
 - 900.1.3.5 Dokumen Penatausahaan Keuangan
 - 900.1.3.6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
 - 900.1.3.7 Daftar Gaji
 - 900.1.3.8 Kartu Gaji
 - 900.1.3.9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - 900.1.3.10 Laporan Keuangan
- 900.1.4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri
 - 900.1.4.1 Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
 - 900.1.4.2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
 - 900.1.4.3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
 - 900.1.4.4 Dokumen Loan Agreement (PHLN) Antara lain : Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
 - 900.1.4.5 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncturan dana
 - 900.1.4.6 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
 - 900.1.4.7 Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
 - 900.1.4.8 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
 - 900.1.4.9 Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),
 - 900.1.4.10 Staff Appraisal Report
 - 900.1.4.11 Report /Laporan
 - 900.1.4.12 Laporan Hutang Daerah
 - 900.1.4.13 *Completion Report/Annual Report*
 - 900.1.4.14 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- 900.1.5 Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
 - 900.1.5.1 Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan
- 900.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
 - 900.1.6.1 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
 - 900.1.6.2 Dokumen Kebijakan Akuntansi
 - 900.1.6.3 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
 - 900.1.6.4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
- 900.1.7 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
 - 900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
 - 900.1.7.2 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank

- 900.1.7.3 Buku Rekening Bank
- 900.1.7.4 Keputusan Pembukuan Rekening
- 900.1.7.5 Pembukuan anggaran terdiri antara lain : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan

- 900.1.8 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
 - 900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
 - 900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
- 900.1.9 Pengelolaan Anggaran Pemilu
 - 900.1.9.1 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
- 900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
 - 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
 - 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
 - 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
 - 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
- 900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
 - 900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
 - 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
 - 900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
 - 900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
- 900.1.12 Anggaran Daerah
 - 900.1.12.1 Anggaran Daerah
 - 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah
- 900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah
 - 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain : fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah

- 900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah Antara lain : fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
- 900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah Antara lain : analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah

- 900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain : fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
- 900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain : fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
- 900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan
 - 900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
 - 900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus
 - 900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
 - 900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain : Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
 - 900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain : Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
- 900.1.15 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
 - 900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
 - 900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
 - 900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
 - 900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain : Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan

900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

000 UMUM

000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

- 000.1.1 Telekomunikasi
- 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
 - 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
 - 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
 - 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
 - 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
- 000.1.5 Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
- 000.1.6 Penyediaan Konsumsi
- 000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
 - 000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
 - 000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
 - 000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
- 000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
 - 000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
 - 000.1.8.2 Penghijauan
 - 000.1.8.3 Perbaikan Gedung
 - 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
 - 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
 - 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
- 000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
 - 000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
 - 000.1.9.2 Pemasangan
- 000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
 - 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
 - 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
- 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
- 000.1.12 Administrasi

000.2 PERLENGKAPAN

- 000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
 - 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
 - 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
- 000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor
 - 000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
 - 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
- 000.2.3 Distribusi
 - 000.2.3.1 Barang habis pakai
 - 000.2.3.2 Barang milik daerah
- 000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan

000.3 PENGADAAN

- 000.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
- 000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
- 000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
- 000.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)
- 000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa
- 000.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

000.4 PERPUSTAKAAN

- 000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 000.4.2 Deposit Bahan Pustaka
 - 000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - 000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
 - 000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional
 - 000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - 000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog
- 000.4.3 Koleksi Pustaka
 - 000.4.3.1 Pembelian
 - 000.4.3.2 Hibah
 - 000.4.3.3 Hadiah
 - 000.4.3.4 Tukar Menukar
 - 000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR
 - 000.4.3.6 Terbitan Internal
 - 000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus
 - 000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
- 000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka
- 000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi
- 000.4.6 Layanan Perpustakaan
 - 000.4.6.1 Keanggotaan
 - 000.4.6.2 Peminjaman
 - 000.4.6.3 Pengembangan gemar baca
- 000.4.7 Kerjasama Perpustakaan
 - 000.4.7.1 MoU
 - 000.4.7.2 Perjanjian kerjasama
 - 000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
- 000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
 - 000.4.8.1 Pengembangan situs web
 - 000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
 - 000.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan
 - 000.4.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital
- 000.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan

- 000.4.10 Konservasi
 - 000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
 - 000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
 - 000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan
- 000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
- 000.4.12 Transformasi Digital
- 000.4.13 Kurasi Digital
- 000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
 - 000.4.14.1 Perpustakaan Umum
 - 000.4.14.2 Perpustakaan Khusus
 - 000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
 - 000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi

000.5 KEARSIPAN

- 000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 000.5.2 Pembinaan Kearsipan
 - 000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
 - 000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
 - 000.5.2.3 Penilaian Arsiparis
 - 000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
 - 000.5.2.5 Data Base Arsiparis
 - 000.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan
 - 000.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi, antara lain : Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
 - 000.5.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
 - 000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan, antara lain : Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
 - 000.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain : Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
 - 000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip, antara lain : Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
- 000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 000.5.3.1 Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
 - 000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
 - 000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif,
 - 000.5.3.4 Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan
 - 000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)
- 000.5.4 Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)

- 000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga
- 000.5.6 Penyusutan Arsip
 - 000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan,

	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia
	000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia
000.5.7		Alih Media
000.5.8		Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
	000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
	000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
000.5.9		Pengelolaan Arsip Statis
	000.5.9.1	Akuisisi (antara lain : Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan
	000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
	000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkrip)
	000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
	000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
	000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
	000.5.9.7	Preservasi Kuratif
	000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
	000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
000.5.10		Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
000.5.11		Pengelolaan SIKN dan JIKN
000.5.12		Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
000.5.13		Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
000.5.14		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
000.5.15		Pengawasan Kearsipan
	000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
	000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
	000.5.15.3	Sanksi

000.6 PERSANDIAN

000.6.1		Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.6.2		Pengamanan persandian
	000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi
	000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi
	000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
000.6.3		Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian
	000.6.3.3	Pelaksanaan
	000.6.3.4	Pelaporan

- 000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
 - 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 000.6.4.2 Jaring Komunikasi
- 000.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
 - 000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
 - 000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
 - 000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
 - 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
 - 000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
 - 000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
 - 000.6.5.7 Pelaporan

000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
 - 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
 - 000.7.1.2 Musrenbang Nasional
 - 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
 - 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
 - 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
 - 000.7.1.6 Musrenbang Desa
- 000.7.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 - 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 - 000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
 - 000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
 - 000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 000.7.2.6 Program kerja tahunan
 - 000.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
 - 000.7.2.8 Laporan Berkala
 - 000.7.2.9 Laporan Insidental
 - 000.7.2.10 Evaluasi Program
- 000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
- 000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
- 000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
- 000.7.6 Aksi Strategis Daerah
 - 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
 - 000.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
 - 000.7.6.3 Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
 - 000.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
 - 000.7.6.5 Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
- 000.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
 - 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
 - 000.7.7.2 Pendanaan Daerah
 - 000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
 - 000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
 - 000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- 000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 - 000.8.1.1 Pembentukan
 - 000.8.1.2 Pengubahan
 - 000.8.1.3 Pembubaran

- 000.8.2 Uraian Jabatan
 - 000.8.2.1 Analisa Jabatan
 - 000.8.2.2 Analisa Beban Kerja
- 000.8.3 Ketatalaksanaan
 - 000.8.3.1 Proses Bisnis
 - 000.8.3.2 Standar Pelayanan
 - 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
 - 000.8.3.4 Pelayanan Publik
- 000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
- 000.8.5 Evaluasi Kelembagaan
- 000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
 - 000.8.6.1 Budaya Kerja
 - 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
 - 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

- 000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- 000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil
- 000.9.3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan
- 000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
- 000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 000.9.6.1 Data
 - 000.9.6.2 Statistik
 - 000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
- 000.9.7 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 000.9.8 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
- 000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
- 000.9.10 Seminar, lokakarya, temukarya, workshop

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

- 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
- 100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
- 100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
 - 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
 - 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
 - 100.1.4.5 Assosiasi Daerah
- 100.1.5 Otonomi khusus dan daerah istimewa
- 100.1.6 Peningkatan
 - 100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah

100.1.7 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM

- 100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
 - 100.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - 100.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
 - 100.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
 - 100.2.4 Fasilitasi Kecamatan
 - 100.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum
- 100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
 - 100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah
 - 100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
 - 100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah
 - 100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
 - 100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah

100.3 HUKUM

- 100.3.1 Program Legislasi
 - 100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
 - 100.3.1.2 Program Legislasi
- 100.3.2 Rancangan
- 100.3.3 Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
 - 100.3.3.1 Keputusan / Ketetapan Gubernur
 - 100.3.3.2 Keputusan / Ketetapan Bupati
 - 100.3.3.3 Keputusan / Ketetapan Walikota
 - 100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
 - 100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
 - 100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota
- 100.3.4 Instruksi / Surat Edaran
 - 100.3.4.1 Instruksi / Surat Edaran Provinsi
 - 100.3.4.2 Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
 - 100.3.4.3 Instruksi / Surat Edaran Kota
 - 100.3.4.4 Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
- 100.3.5 Surat Perintah
 - 100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur
 - 100.3.5.2 Surat Perintah Bupati
 - 100.3.5.3 Surat Perintah Walikota
 - 100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II
- 100.3.6 Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
- 100.3.7 Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU) / Kontrak / Perjanjian kerja sama
 - 100.3.7.1 Dalam Negeri
 - 100.3.7.2 Luar Negeri

- 100.3.8 Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)
- 100.3.9 Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum
- 100.3.10 Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)

- 100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum
 - 100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
 - 100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata
 - 100.3.11.3 Tata Usaha Negara
 - 100.3.11.4 Perburuhan
 - 100.3.11.5 Arbitrase
 - 100.3.11.6 Sengketa Adat
- 100.3.12 Perijinan
- 100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 100.3.13.1 Hak Cipta
 - 100.3.13.2 Hak Paten
 - 100.3.13.3 Hak Desain Industri
 - 100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
 - 100.3.13.5 Hak Merk
- 100.3.14 Permohonan HAKI yang ditolak

200 POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
 - 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.3 Bela Negara
 - 200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
 - 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
- 200.1.3 Kewaspadaan Nasional
 - 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
 - 200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
 - 200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
 - 200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
 - 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
- 200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
 - 200.1.4.1 Ketahanan Seni
 - 200.1.4.2 Ketahanan Budaya
 - 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
 - 200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan
 - 200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan
 - 200.1.4.6 Fasilitasi
 - 200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
 - 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
 - 200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
 - 200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas
 - 200.1.4.11 Fasilitasi Ormas

200.1.5	Politik Dalam Negeri
200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh
200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
200.1.5.6	Pemerintah Daerah
200.1.5.7	Database Parpol
200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
200.1.5.9	Pemilihan Umum
200.1.6	Ketahanan Ekonomi
200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2	PEMILU
200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu
200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
270.04.05	Peta Daerah Pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pemilu
200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
200.2.5.3	Daftar bakal calon
200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6	Kampanye Pemilu

	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
200.2.7	Dana Kampanye	
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye

200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara
200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
200.2.8.2	Master surat suara
200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu
200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu
200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
300.1.4	Perlindungan Masyarakat
300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
300.2.2.6	Registrasi BEACON
300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi

- 300.2.8 Operasi Komunikasi
 - 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
 - 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
 - 300.2.8.3 Registrasi BEACON
- 300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
- 300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
- 300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi

- 300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi
 - 300.2.12.1 Laporan Harian
 - 300.2.12.2 Laporan Bulanan
 - 300.2.12.3 Laporoan Tahunan
 - 300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- 400.1.1 Kebijakan di
- 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
 - 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
 - 400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi
 - 400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
 - 400.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan
 - 400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan
 - 400.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
 - 400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.3 Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
 - 400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha
 - 400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
 - 400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan
 - 400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi
 - 400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
 - 400.1.4.9 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
 - 400.1.4.10 Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
 - 400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat
 - 400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
 - 400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
 - 400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
- 400.1.5 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
 - 400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal
 - 400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat
 - 400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat
 - 400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
 - 400.1.5.5 Ketenagakerjaan
 - 400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga
 - 400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi

- 400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus
 - 400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
 - 400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
 - 400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
 - 400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
 - 400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
 - 400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
 - 400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
 - 400.2.2.1 Data gender
 - 400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi
- 400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
 - 400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
 - 400.2.3.2 Data perlindungan perempuan
 - 400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi
 - 400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan
 - 400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
 - 400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender
 - 400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
- 400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
 - 400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
 - 400.2.4.2 Data perlindungan anak
 - 400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
 - 400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan
 - 400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
- 400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
 - 400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
 - 400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
 - 400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak
 - 400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi
 - 400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh
 - 400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
- 400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
- 400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak
- 400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN

- 400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
 - 400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
 - 400.3.2.2 Pelatihan Sosial

	400.3.2.3	Peringatan Hari anak
	400.3.2.4	Block Grant
400.3.3	Pendidikan Masyarakat	
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
	400.3.3.3	Pembinaan Program
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
	400.3.3.5	Pameran
	400.3.3.6	Rakor
	400.3.3.7	Sosialisasi
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	

400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
400.3.5.2	Block Grant
400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus
400.3.6.1	Kurikulum,Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
400.3.6.2	Block Grant
400.3.6.3	Lomba, festival
400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
400.3.6.5	Pendataan
400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
400.3.7.3	Sertifikasi Guru
400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas
400.3.8.1	Kurikulum
400.3.8.2	Bahan Ajar
400.3.8.3	Pelatihan
400.3.8.4	Block grant
400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival
400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
400.3.9.1	Bahan ajar
400.3.9.2	Petunjuk Teknis
400.3.9.3	Block grant
400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
400.3.9.8	Pendataan
400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
400.3.10.3	Setifikasi Guru
400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
400.3.10.7	Block grant
400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.11	Penilaian Pendidikan
400.3.11	Penilaian Akademik
400.3.12	Penilaian Non Akademik

- 400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
 - 400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
 - 400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
- 400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
 - 400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
 - 400.3.13.2 Sarana Pendidikan
 - 400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi

400.4 KEOLAHRAGAAN

- 400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
 - 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
 - 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
 - 400.4.3.1 Olahraga Massal
 - 400.4.3.2 Olahraga Tradisional
 - 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
- 400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga
 - 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
 - 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
 - 400.4.4.3 Olahraga Prestasi
 - 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga
- 400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
 - 400.4.5.1 Olahraga Tradisional
 - 400.4.5.2 Layanan Khusus
- 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 - 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
 - 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
- 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
 - 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
 - 400.4.7.2 Kompetisi
 - 400.4.7.3 IPTEK Olahraga
- 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
 - 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
 - 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
- 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
 - 400.4.9.1 Industri Olahraga
 - 400.4.9.2 Promosi Olahraga
- 400.4.10 Olahraga Prestasi
 - 400.4.10.1 Daerah
 - 400.4.10.2 Nasional
 - 400.4.10.3 Internasional
- 400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
 - 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
 - 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
 - 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga

400.5 KEPEMUDAAN

- 400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
 - 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)

- 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum
- 400.5.2.3 Pengembangan

400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda
400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda
400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
	400.5.5.1 Pengkajian
	400.5.5.2 Pengembangan
	400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)
400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
	400.5.6.1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
	400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan
400.5.7	Kewirausahaan
	400.5.7.1 Kelembagaan
	400.5.7.2 Pengaderan
	400.5.7.3 Perintisan
400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
	400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan
	400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan
	400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan
	400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan
400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
	400.5.9.1 Standardisasi
	400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda
400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
	400.5.10.1 Kemitraan
	400.5.10.2 Penghargaan Pemuda

400.6 KEBUDAYAAN

400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
	400.6.2.1 Registrasi Nasional
	400.6.2.2 Pelindungan
	400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
	400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman
	400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
	400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
	400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
	400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi

- 400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
 - 400.6.4.1 Sejarah
 - 400.6.4.2 Pemetaan nilai
 - 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
 - 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
 - 400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
 - 400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah
- 400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
 - 400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya
 - 400.6.5.2 Kekayaan budaya
 - 400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
 - 400.6.5.4 Diplomasi budaya

400.7 KESEHATAN

- 400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
 - 400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga
 - 400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
 - 400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer
 - 400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
 - 400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
 - 400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology
 - 400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah
 - 400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer
 - 400.7.2.9 Pembiayaan darah
 - 400.7.2.10 Penggunaan darah rasional
 - 400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
 - 400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil
 - 400.7.2.13 Akreditasi puskesmas
 - 400.7.2.14 Puskesmas berprestasi
- 400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
 - 400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan
 - 400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
 - 400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat
 - 400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
 - 400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
 - 400.7.3.6 Pelayanan pasien jaminan kesehatan
 - 400.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
 - 400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit
 - 400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
 - 400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
- 400.7.4 Keperawatan dan keteknisian medik
 - 400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar
 - 400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
 - 400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
 - 400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
 - 400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan
- 400.7.5 Penunjang medik dan sarana kesehatan

	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra
400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung	
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkulosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang	
	400.7.9.1	Pengendalian malaria
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular	
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11	Penyehatan lingkungan	
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12	Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	
400.7.13	Gizi	
	400.7.13.1	Gizi makro
	400.7.13.2	Gizi mikro
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
400.7.14	Kesehatan ibu	

	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15	Kesehatan anak	
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga	
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga
400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan	
	400.7.18.1	Harga obat publik
	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	
	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun

- 400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
- 400.7.25 Intelegensia Kesehatan
 - 400.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia
 - 400.7.25.2 Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
- 400.7.26 Kesehatan Haji
 - 400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
 - 400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko
- 400.7.27 Promosi Kesehatan
 - 400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan
 - 400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan
 - 400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan
 - 400.7.27.4 Hari kesehatan

400.7.28	Data dan Informasi
400.7.28.1	Statistik kesehatan
400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
400.7.30.2	Standardisasi produk pangan
400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
400.7.31	Rekam Medis

400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN

400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.8.2	Fasilitasi
400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
400.8.2.4	Kasus Keagamaan
400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan
400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

400.9 SOSIAL

400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak
400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
	400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
	400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan
400.9.3	Rehabilitasi Sosial
	400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan
	400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi social
	400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
	400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung
	400.9.4.2 Tuna susila dan korban trafficking perempuan

- 400.9.4.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi
penyiapan, reintegrasi
 - 400.9.4.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok
minoritas
- 400.9.5 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia
400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga,
400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
400.9.10.4	Kerjasama
400.9.11	Jaminan Sosial
400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi
400.9.11.4	Kerjasama
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
400.9.12.1	Ketahanan keluarga
400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil
400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
400.9.14.5	Bantuan Langsung
400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- 400.10.1 Kebijakan di
- 400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
 - 400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
- 400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
 - 400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
 - 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
 - 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
 - 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
- 400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
 - 400.10.4.1 Budaya Nusantara
 - 400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
 - 400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
 - 400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan
- 400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
 - 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
 - 400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
 - 400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
 - 400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
- 400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
 - 400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan
 - 400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
 - 400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
 - 400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi
 - 400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
- 400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

- 400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.11.2 Pertamanan
 - 400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
 - 400.11.2.2 Taman Kota
 - 400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota
- 400.11.3 Pemakaman
 - 400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
 - 400.11.3.2 Pemakaman
 - 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
- 400.11.4 Jalur Hijau
 - 400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
 - 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
 - 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
- 400.11.5 Peran Serta Masyarakat
- 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
- 400.11.7 Pengelolaan Data
- 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- 400.12.1 Kebijakan di
- 400.12.2 Pendaftaran Penduduk
 - 400.12.2.1 Identitas Penduduk
 - 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
 - 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
 - 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
 - 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.3 Pencatatan Sipil
 - 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
 - 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
 - 400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta
 - 400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
 - 400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi
 - 400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
 - 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
 - 400.12.5.2 Kualitas Penduduk
 - 400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
 - 400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
 - 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
- 400.12.6 Penyerasian Kependudukan
 - 400.12.6.1 Indikator Kependudukan
 - 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
 - 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
 - 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga
 - 400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA

- 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
 - 400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
- 400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
 - 400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
- 400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
- 400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
 - 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
 - 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
- 400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
 - 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
 - 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter

- 400.13.7 Pengembangan Sistem
 - 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.8 Pengembangan Materi
 - 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
 - 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.10 Analisis Sosial
- 400.13.11 Analisis Ekonomi
- 400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
- 400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- 400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
- 400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
- 400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana
- 400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
- 400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
- 400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
 - 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
 - 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana
- 400.13.20 Akses dan
 - 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah
 - 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana
- 400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
- 400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria
 - 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
 - 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
- 400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
- 400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
- 400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
- 400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
- 400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
 - 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
 - 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
- 400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja

- 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
- 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
- 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
 - 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
- 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia
 - 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia
- 400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
- 400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
- 400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
 - 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
 - 400.13.35.2 Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga

- 400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
- 400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.2 Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga
- 400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga
- 400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
- 400.13.41 Advokasi dan pencitraan
- 400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - 400.13.42.1 Promosi
 - 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
 - 400.13.42.3 Produk media komunikasi
- 400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
- 400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
 - 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah
 - 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah
- 400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 - 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 - 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
- 400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
 - 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
 - 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
- 400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
 - 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
 - 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
- 400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan
 - 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
 - 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini
- 400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
 - 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
 - 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data
- 400.13.51 Analisis dan evaluasi
 - 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
 - 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data
 - 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
 - 400.13.52.2 Pengelolaan bank data
- 400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi
 - 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
 - 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
 - 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
 - 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

- 400.14.1 Keprotokolan
 - 400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
 - 400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan
 - 400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
 - 400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
- 400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat
- 400.14.3 Dokumentasi/
- 400.14.4 Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
 - 400.14.4.1 Kliping koran
 - 400.14.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat
 - 400.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan
- 400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
 - 400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah
 - 400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
 - 400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan
 - 400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)
 - 400.14.5.5 Forum Kehumasan
 - 400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa
- 400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD
- 400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
- 400.14.8 Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal
- 400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
- 400.14.10 Pameran /sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan
- 400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
- 400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

- 500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
- 500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
 - 500.1.2.2 Akses Pangan
 - 500.1.2.3 Kerawanan Pangan
- 500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
 - 500.1.3.1 Distribusi Pangan
 - 500.1.3.2 Harga Pangan
 - 500.1.3.3 Cadangan Pangan
- 500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
 - 500.1.4.1 Konsumsi Pangan
 - 500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
 - 500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
- 500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan
- 500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
- 500.1.7 Bimbingan Teknis
- 500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

- 500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
 - 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
 - 500.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdagangan
 - 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
 - 500.2.2.4 Informasi Perusahaan
 - 500.2.2.5 Pelaku Pasar
 - 500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
 - 500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
 - 500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
 - 500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
 - 500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi
 - 500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
 - 500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
 - 500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
 - 500.2.2.14 Informasi Pasar
 - 500.2.2.15 Informasi Hasil Industri
 - 500.2.2.16 Barang Strategis
 - 500.2.2.17 Bahan Pokok Agro
- 500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - 500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar
 - 500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi
 - 500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar
 - 500.2.3.4 Tata usaha
 - 500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi
 - 500.2.3.6 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
 - 500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
 - 500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan
 - 500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka industri
 - 500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan
 - 500.2.3.11 Jasa
 - 500.2.3.12 Kerjasama
 - 500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama
 - 500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian
 - 500.2.3.15 UTP dan Standar Ukuran
 - 500.2.3.16 Pengawasan
 - 500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
 - 500.2.3.18 Balai Pengujian UTP
- 500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 500.2.4.1 Pengkajian pasar
 - 500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
 - 500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
 - 500.2.4.4 Pengkajian pasar
 - 500.2.4.5 Pengembangan Pasar
 - 500.2.4.6 Sistem informasi
 - 500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
 - 500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang
 - 500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang

- 500.2.5 Bimbingan Teknis
- 500.2.6 Evaluasi

500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

- 500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
 - 500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
 - 500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
 - 500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
 - 500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas
- 500.3.3 Produksi
 - 500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
 - 500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan

	500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
	500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500.3.4	Pembiayaan	
	500.3.4.1	Program Pendanaan
	500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
	500.3.4.3	Urusan Permodalan
	500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
	500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
	500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
	500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
	500.3.5.2	Ekspor dan Impor
	500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
	500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
	500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
	500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
	500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
	500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
	500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
	500.3.6.5	Advokasi
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
	500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
	500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
	500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi
	500.3.8.2	Penelitian UKM
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)	
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	

500.4 KEHUTANAN

500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.4.2	Penyuluhan	
	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan
	500.4.2.3	Program Penyuluhan
	500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
	500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
	500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
	500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
	500.4.2.8	Deseminasi
	500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan
500.4.3	Planologi Kehutanan	

500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan
500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.3	Kerjasama
500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
500.4.4.5	Perpanjangan
500.4.4.6	Modal dan Peralatan
500.4.4.7	Investasi Industri
500.4.4.8	Peralatan
500.4.4.9	Tenaga Kerja
500.4.4.10	Pemegang Saham
500.4.4.11	Neraca Perusahaan
500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
500.4.4.17	Produksi Kayu
500.4.4.18	Produksi non kayu
500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.21	Industri Non Kayu
500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
500.4.4.25	Pemblokiran
500.4.4.26	Denda
500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil

500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan
500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan

	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam
	500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
	500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih
	500.4.7.2	Kebun Benih
	500.4.7.3	Tegakan Benih
	500.4.7.4	Pengadaan Benih
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.7	Pembibitan
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial

	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
500.4.8		Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
	500.4.8.3	Diseminasi
	500.4.8.4	Gelar Teknologi
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
500.5.1		Kebijakan di
500.5.2		Perikanan Tangkap
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan
	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.3		Perikanan Budidaya
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri

	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.18	Pengembangan Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5		Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6		Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas

	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500.5.7	Karantina Ikan	
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
	500.5.7.14	Surat Perintah
	500.5.7.15	Rekomendasi
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
	500.5.7.21	Lokasi Karantina

500.6 **PERTANIAN**

500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.6.2	Perlindungan hortikultura	
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
	500.6.3.1	Penilaian Varietas
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
	500.6.4.1	Basis Data Lahan
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	

	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
500.6.6		Pembiayaan Pertanian
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
500.6.7		Pupuk Pestisida
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8		Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9		Perbenihan Tanaman Pangan
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10		Budidaya Serealia
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11		Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12		Tanaman Pangan
	500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
500.6.13		Pascapanen Tanaman Pangan
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi
500.6.14		Pengolahan Hasil Pertanian
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Holtikultura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
500.6.15		Mutu dan Standarasi
	500.6.15.1	Standardisasi
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi

- 500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi
 - 500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan
 - 500.6.16.2 Investasi
 - 500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri
 - 500.6.16.4 Promosi Luar Negeri
- 500.6.17 Pemasaran Domestik
 - 500.6.17.1 Informasi Pasar
 - 500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
 - 500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar
 - 500.6.17.4 Jaringan Pemasaran
- 500.6.18 Administrasi
- 500.6.19 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
 - 500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan
 - 500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
- 500.6.20 Diseminasi
- 500.6.21 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
 - 500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar
 - 500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya

- 500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
- 500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
- 500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan
- 500.6.25 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
- 500.6.26 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 500.6.26.1 Hak Cipta
 - 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
 - 500.6.26.3 Hak Paten Biasa
 - 500.6.26.4 Hak Merek
 - 500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
 - 500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
 - 500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
- 500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
 - 500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
 - 500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
 - 500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
- 500.6.28 Pelayanan Hukum
 - 500.6.28.1 Sertifikasi
 - 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
- 500.6.29 Karantina Pertanian
 - 500.6.29.1 Karantina Tumbuhan
 - 500.6.29.2 Karantina Hewan
- 500.6.30 Bimbingan Teknis
- 500.6.31 Evaluasi

500.7 PETERNAKAN

- 500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
 - 500.7.2.2 Pakan Ternak
 - 500.7.2.3 Budidaya Ternak
 - 500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit
 - 500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
- 500.7.3 Bimbingn Teknis
- 500.7.4 Evaluasi

500.8 PERKEBUNAN

- 500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.8.2	Tanaman Semusim
500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim
500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim

500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman
500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.4	Tanaman Tahunan
500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan
500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
500.8.5	Perlindungan Perkebunan
500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu
500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu
500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu
500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha
500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan
500.8.8	Evaluasi Perkebunan

500.9 PERINDUSTRIAN

500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama
500.9.2.1	Industri Manufaktur
500.9.2.2	Industri Agro
500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.3	Promosi Industri
500.9.3.1	Industri Manufaktur
500.9.3.2	Promosi Industri Agro
500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.4	Standarisasi dan Teknologi
500.9.4.1	Industri Manufaktur
500.9.4.2	Industri Agro
500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.5	Hak dan Kekayaan Intelektual
500.9.5.1	Industri Manufaktur
500.9.5.2	Industri Agro
500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.6	Industri Hijau
500.9.6.1	Industri Manufaktur
500.9.6.2	Industri Agro
500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah

- 500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
- 500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- 500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
- 500.9.10 Fasilitas Pengembangan Kawasan Industri
- 500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
- 500.9.12 Standarisasi
 - 500.9.12.1 Standar
 - 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
 - 500.9.12.3 Infrastruktur Standar
- 500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
 - 500.9.13.1 Kebijakan Industri
 - 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
 - 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial
- 500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
 - 500.9.14.1 Industri Hijau
 - 500.9.14.2 Lingkungan Hidup
 - 500.9.14.3 Energi
- 500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
 - 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
 - 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
 - 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
- 500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri

500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- 500.10.1 Kebijakan di
- 500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
 - 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan
 - 500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.2.3 Pertambangan
 - 500.10.2.4 Panas Bumi
 - 500.10.2.5 Geosains
 - 500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
 - 500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan
- 500.10.3 Penelitian Kegeologian
 - 500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian
 - 500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian
 - 500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian
 - 500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
 - 500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
 - 500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
 - 500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
 - 500.10.3.9 Survei Geologi

500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.4.4	Survei Geologi
500.10.4.5	Konservasi
500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
500.10.5.4	Survei Geologi
500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana
500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan
500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
500.10.7.7	Partisipasi Interest
500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.10	Usaha penunjang
500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT

	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specification
	500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi Energi	
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi

	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
	500.10.15.9	Investment Grade Audit (IGA)
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan	
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
500.10.20	Sertifikasi	
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik

	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral

500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara
500.10.27.1	Ketenagakerjaan
500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen
500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada
500.10.27.12	Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan
500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
500.10.28	Penerimaan Negara
500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/
500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia

	500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
	500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/
	500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
	500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
	500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
	500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
	500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
	500.10.29.16	Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
	500.10.29.17	Pengawasan Teknis
	500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
	500.10.29.19	Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara,
500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan	
	500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
	500.10.30.3	Dokumen
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
	500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litbang	
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian Informasi
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	

	500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.4	Study
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
	500.10.34.7	Teknologi Gas
500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
	500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber
	500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
	500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara
500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	
	500.10.36.1	Energi baru terbarukan
	500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
	500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
	500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit

500.11 PERHUBUNGAN

500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan	
	500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe
	500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
	500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama
	500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
	500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
	500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
	500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer
	500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
	500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan	
	500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor	
	500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
	500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor	
	500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan
	500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
	500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
	500.11.5.4	Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan

- 500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan
 - 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
- 500.11.7 Perlengkapan Jalan
 - 500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan
 - 500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
 - 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
 - 500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan
 - 500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
- 500.11.8 Angkutan Penumpang
 - 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
 - 500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
 - 500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi
 - 500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang
 - 500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
 - 500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum
 - 500.11.8.7 Angkutan perintis
 - 500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum
- 500.11.9 Angkutan Barang
 - 500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
 - 500.11.9.2 Tarif angkutan barang
 - 500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu
 - 500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang
 - 500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan
- 500.11.10 Monitoring Operasional
 - 500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi
 - 500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda
- 500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 500.11.11.1 Pedoman Teknis
 - 500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - 500.11.11.3 Bimtek PPNS
 - 500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik
- 500.11.12 Analisa dan
 - 500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
 - 500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
- 500.11.13 Pengembanga
 - 500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
 - 500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

- 500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
 - 500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
- 500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
 - 500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan
 - 500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.18.1 Manajemen lalu lintas
 - 500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
 - 500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
- 500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
 - 500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
 - 500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
- 500.11.21 Tarif dan Keperintisan
 - 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
- 500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
 - 500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang
- 500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
 - 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
 - 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - 500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
- 500.11.24 Angkutan Perkotaan
 - 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek

- 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
- 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan
- 500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
 - 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
 - 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang
 - 500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan
- 500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan
 - 500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
 - 500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
 - 500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan

	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
	500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan
500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
	500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
	500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	
	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
500.11.31	Audit Keselamatan	
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.32	Inspeksi Keselamatan	
	500.11.32.1	Pedoman keselamatan
	500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.33	Parkir	
	500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
	500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
	500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah

500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.12.2	Telekomunikasi	
	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
500.12.3	Penyiaran	

	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
500.12.5	Pengendalian Informatika	
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
500.12.6	e- Government	
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	e- Business	
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media Online
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha

- 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
- 500.12.15 Infrastruktur Informatika
 - 500.12.15.1 Jaringan
 - 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
 - 500.12.15.3 Keamanan Informatika
- 500.12.16 Sistem dan Data
 - 500.12.16.1 Portal dan Konten
 - 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
- 500.12.17 Pusat Kerjasama
 - 500.12.17.1 Kerja Sama daerah
 - 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
- 500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.1 Pelayanan Informasi
 - 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.3 Bimbingan Teknis
- 500.12.19 Evaluasi

500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- 500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
 - 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
 - 500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - 500.13.2.3 Industri Pariwisata
 - 500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
 - 500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif,
- 500.13.3 Pemasaran Pariwisata
 - 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
 - 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri
 - 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
 - 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia
- 500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
 - 500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman
 - 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
 - 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa
- 500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
 - 500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
 - 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur
 - 500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitas
- 500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
 - 500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
 - 500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

500.14 STATISTIK

- 500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
 - 500.14.2.1 Perencanaan

	500.14.2.2	Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
500.14.3	Survei	
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
	500.14.3.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan
	500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
500.14.4	Konsolidasi Data Statistik	
	500.14.4.1	Kompilasi Data
	500.14.4.2	Analisis data
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	

500.15 KETENAGAKERJAAN

500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja
	500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
	500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan

	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta

	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6	Bina Pemagangan	
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3	Bursa Kerja
	500.15.8.4	Analisis Jabatan
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
	500.15.9.1	Antar Kerja
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar
500.15.11	Standardisasi Profesi	
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja
	500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
	500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial	
	500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
	500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
	500.15.13.3	Pemasarakatan Hubungan Industrial
500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
	500.15.14.1	Pengupahan
	500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian
500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	

- 500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
- 500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
- 500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
- 500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
- 500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana
 - 500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan
 - 500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
 - 500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan
 - 500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem
- 500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
- 500.15.20 Bina Penegakan Hukum
 - 500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
 - 500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
 - 500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum
- 500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3
 - 500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan
 - 500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
 - 500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
- 500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan
 - 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan

500.16 PENANAMAN MODAL

- 500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
 - 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam
 - 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
 - 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
 - 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
- 500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
 - 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
 - 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
 - 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
 - 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
 - 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
- 500.16.4 Promosi Penanaman Modal
 - 500.16.4.1 Pengembangan Promosi
 - 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi

	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
	500.16.4.4	Promosi Sektoral
	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal	
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
	500.16.5.2	Kerja Sama Regional

- 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
- 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
 - 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
 - 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
 - 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
 - 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
 - 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
- 500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
 - 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
 - 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan
 - 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
 - 500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
 - 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

500.17 PERTANAHAN

- 500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - 500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
 - 500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
- 500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
 - 500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
 - 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
 - 500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
- 500.17.4 Sengketa Tanah
 - 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
 - 500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI

- 500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
 - 500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
 - 500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
 - 500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
- 500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
 - 500.18.3.1 Penyiapan Lahan
 - 500.18.3.2 Penyiapan Sarana
 - 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
 - 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
- 500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
 - 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
 - 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
 - 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
 - 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi
- 500.18.5 Partisipasi Masyarakat
 - 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
 - 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
 - 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
 - 500.18.5.4 Pelayanan Investasi

- 500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
 - 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
 - 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
 - 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
 - 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
 - 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
- 500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
 - 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
 - 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
 - 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
 - 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
- 500.18.8 Pengembangan Usaha
 - 500.18.8.1 Kewirausahaan
 - 500.18.8.2 Produksi
 - 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
 - 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
- 500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
 - 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
 - 500.18.9.2 Pengembangan Sarana
 - 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
 - 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 500.18.10 Penyerasian Lingkungan
 - 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
 - 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
 - 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1 PEKERJAAN UMUM

- 600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
 - 600.1.2.2 Kelembagaan
 - 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan
- 600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.2 Manajemen Mutu
 - 600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
 - 600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman
- 600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa
 - 600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
 - 600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
- 600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - 600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
 - 600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung

	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6		Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)
	600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan
	600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
600.1.7		Pengembangan Jaringan Jalan
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8		Pembangunan Jalan
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9		Preservasi Jalan
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10		Pengelolaan Jembatan
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11		Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12		Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.1	Persiapan pengusaha jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusaha jalan tol
600.1.13		Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14		Pengembangan Kawasan Permukiman
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15		Pembinaan Penataan Bangunan
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
	600.1.15.5	Kelembagaan
600.1.16		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- 600.1.16.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
- 600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
- 600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
- 600.1.16.5 Kelembagaan
- 600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
- 600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
- 600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - 600.1.17.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
 - 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
 - 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
 - 600.1.17.5 Kelembagaan
 - 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
- 600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi

600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

- 600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
 - 600.2.2.3 Kemitraan
- 600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
 - 600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
 - 600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan
- 600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
 - 600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
 - 600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
 - 600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
- 600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - 600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.2.5.2 Analisa Teknik
 - 600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
 - 600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan
- 600.2.6 Penyediaan Rumah Susun
 - 600.2.6.1 Perencanaan Teknik
 - 600.2.6.2 Penyediaan
 - 600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
 - 600.2.6.4 Pengelolaan
- 600.2.7 Penyediaan Rumah Khusus
 - 600.2.7.1 Perencanaan Teknik
 - 600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
 - 600.2.7.3 Bimbingan teknis dan supervisi
 - 600.2.7.4 Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
 - 600.2.7.5 Perencanaan Teknik
 - 600.2.7.6 Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni

	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8		Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9		Investasi Infrastruktur
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11		Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
	600.2.11.1	Kelembagaan

	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12		Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
600.2.13		Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
	600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
	600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14		Peningkatan Jasa Konstruksi
	600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
	600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15		Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan
	600.2.15.2	Pengembangan Materi
	600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16		Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
	600.2.16.1	Antar Sektor
	600.2.16.2	Antar Wilayah
600.2.17		Pengembangan Kawasan Strategis
	600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
	600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18		Pengembangan Kawasan Perkotaan
	600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
	600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota
	600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
	600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
	600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur
600.2.19		Pemantauan dan Evaluasi

600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)

600.3.1		Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
600.3.2		Perencanaan
	600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
	600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
	600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
	600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
	600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana
	600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
	600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan
600.3.3		Pemanfaatan dan Pengendalian
	600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
	600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
	600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
600.3.4		Pemetaan
	600.3.4.1	Peta Dasar
	600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
	600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air

600.4 LINGKUNGAN HIDUP

- 600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
 - 600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- 600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
 - 600.4.3.1 Evaluasi Penerapan
 - 600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup
- 600.4.4 Ekonomi Lingkungan
- 600.4.5 Dampak Lingkungan
 - 600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan
 - 600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
 - 600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
- 600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan
 - 600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa
 - 600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
 - 600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
 - 600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak
- 600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan
 - 600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana dan Jasa
 - 600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
 - 600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
 - 600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak
- 600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
 - 600.4.8.1 Pengembangan
 - 600.4.8.2 Pemanfaatan
 - 600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik
 - 600.4.8.4 Keamanan Hayati
 - 600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan
- 600.4.9 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
 - 600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem
 - 600.4.9.2 Rawa
- 600.4.10 Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
 - 600.4.10.1 Perangkat mitigasi
 - 600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
 - 600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon
 - 600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan
- 600.4.11 Adaptasi Perubahan Iklim
 - 600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain :
Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim,
Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
 - 600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim
- 600.4.12 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi
 - 600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
- 600.4.13 Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
 - 600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan
 - 600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan
 - 600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping

- 600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
- 600.4.14 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
 - 600.4.14.1 Pemantauan
 - 600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi

- 600.4.15 Pengelolaan Sampah
 - 600.4.15.1 Pembatasan sampah
 - 600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
 - 600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura
 - 600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura
- 600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan
 - 600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
 - 600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan
- 600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - 600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
 - 600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
- 600.4.18 Penegakan hukum pidana lingkungan
 - 600.4.18.1 Penyidikan
 - 600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
 - 600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS
- 600.4.19 Komunikasi Lingkungan
 - 600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi
 - 600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye
- 600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat
 - 600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan
 - 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan
- 600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat
 - 600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
 - 600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan
- 600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
 - 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat
 - 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha
- 600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan
 - 600.4.23.1 Pengelolaan Data
 - 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
 - 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
 - 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
- 600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
 - 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
 - 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
- 600.4.25 Standarisasi dan teknologi
 - 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
 - 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia
 - 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan
- 600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
 - 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
 - 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

- 700.1.1 Rencana Pengawasan
 - 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
 - 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
 - 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
- 700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan

700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan
700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung
700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung
700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan
700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan
700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain :
800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain : Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain : Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai
800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain : Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain : Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
800.1.2.5	Pengangkatan ASN
800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegawai
800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembangan Karir
800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja

	800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain : Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
800.1.5		Kinerja Aparatur Sipil Negara
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar
800.1.6		Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain : Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
800.1.7		Bantuan Hukum
800.1.8		Status dan Kedudukan Pegawai
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9		Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10		Pengawasan dan pengendalian
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11		Administrasi Pegawai
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12		Kesejahteraan Pegawai
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan

800.1.12.4	Bantuan Sosial
800.1.12.5	Pakaian Dinas
800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
800.1.12.10	Rekam Medis

- 800.1.13 Administrasi Perseorangan
 - 800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - 800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
 - 800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
 - 800.1.13.4 Sekretaris Daerah
 - 800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
- 800.1.14 Penilaian Kompetensi
 - 800.1.14.1 Penilaian Kompetensi
 - 800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi

800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 800.2.1 Kebijakan di
- 800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
 - 800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
 - 800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
 - 800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
 - 800.2.2.4 Modul-modul diklat
 - 800.2.2.5 Panduan fasilitator
 - 800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
 - 800.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
 - 800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
 - 800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
- 800.2.3 Widyaiswara
 - 800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
 - 800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
 - 800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
 - 800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara
 - 800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
 - 800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
- 800.2.4 Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan
 - 800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
 - 800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
 - 800.2.4.5 Sistem informasi diklat
 - 800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat
 - 800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
- 800.2.5 Alumni

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

- 900.1.1 Rencana
 - 900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
 - 900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
 - 900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
 - 900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
- 900.1.2 Penyusunan Anggaran
 - 900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
 - 900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota

- 900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
- 900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

900.1.3	Pelaksanaan Anggaran
900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
900.1.3.2	Pendapatan
900.1.3.3	Belanja
900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
900.1.3.7	Daftar Gaji
900.1.3.8	Kartu Gaji
900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
900.1.4.4	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) Antara lain : Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta
900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No Objection Letter (NOL),
900.1.4.10	Staff Appraisal Report
900.1.4.11	Report /Laporan
900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
900.1.4.13	<i>Completion Report/Annual Report</i>
900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan
900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
900.1.7.3	Buku Rekening Bank
900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening

	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP) dan Belanja Kas
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
900.1.9	Penyusunan	
900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	
	900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
	900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
	900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro
		Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya
	900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah	
	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12	Anggaran Daerah	
	900.1.12.1	Anggaran Daerah
	900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah	
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain : fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain : fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah

900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain : analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain : fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain : fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan
900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus
900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain : Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain : Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan

900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain : Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah